



A. BAGI PEMERINTAH PUSAT

Mendukung Guru SLB dan 3T pada Masa Pandemi COVID-19

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

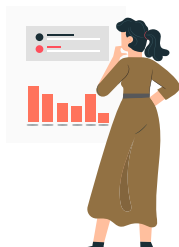
dan Wahana Visi Indonesia didukung PREDIKT

Oktober 2020

Latar Belakang

Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak maret 2020 telah menyebabkan penutupan sementara 434.412 Satuan Pendidikan (SP) (Kemendikbud, 2020) sehingga proses pembelajaran berpindah ke metode Belajar Dari Rumah (BDR). Dampak penutupan sekolah dialami oleh lebih dari 68 juta peserta didik serta 4 juta lebih guru dan tenaga pendidik (Kemendikbud, 2020). **Situasi ini dapat mengakibatkan menurunnya kualitas pendidikan karena BDR memerlukan keahlian baru, baik bagi peserta didik maupun guru, terutama untuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan SP di daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T)** (Yarrow, 2020).

Sejalan dengan hasil survei WVI di daerah 3T, peserta didik mempelajari lebih sedikit konten melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ), baik yang dibantu teknologi maupun kunjungan guru ke rumah. Peserta didik belum siap untuk belajar secara mandiri, karena **37% peserta didik tidak dapat mengelola waktu untuk belajar, 30% mengalami kesulitan memahami subjek, 24% tidak terhubung dengan akses internet, 11% merasa tugas terlalu banyak, dan 21% tidak memahami instruksi guru** (WVI, 2020)



Banyak orang tua dan praktisi kalangan pendidikan khawatir terhadap dampak jangka panjang keterbatasan akses pendidikan berkualitas bagi peserta didik, baik dari segi

psikososial, mental dan emosional, serta perlindungan dari kekerasan pada anak (UNICEF, 2020). Oleh karena itu, **aspirasi berbagai kelompok masyarakat yang mendesak agar sekolah dibuka kembali semakin kuat seiring waktu.**



Akan tetapi, laju peningkatan kasus positif COVID-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan. **Pada bulan September 2020, rata-rata kasus baru berada di kisaran 3.000 hingga 4.000 kasus per hari dengan angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya** (KPC-PEN, 2020; *The Jakarta Post*, 2020).



Tujuan dan Metodologi Penelitian

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dit. GTK Dikmen

Dikusus) di bawah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Republik Indonesia, bersama dengan Wahana Visi Indonesia (WVI), serta PREDIKT melakukan penelitian **untuk memahami lebih dalam situasi dan kondisi saat ini dari sudut pandang guru dan tenaga kependidikan, termasuk guru SLB dan sekolah yang berada di wilayah 3T, serta proses menuju pembukaan kembali sekolah dengan skema Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).** Penelitian ini **menampung aspirasi 27.046 guru dari seluruh provinsi di Indonesia, termasuk 7.027 guru SLB, serta 1.247 guru dari wilayah 3T,** melalui survei daring dengan Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian & Berkelanjutan (SIM PKB) Kemendikbud RI serta jaringan WVI.



Selain itu, dilaksanakan pula wawancara informan kunci (*Key Informant Interview - KII*) dengan dinas pendidikan 3 provinsi, yaitu **Papua, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur**, serta 5 kabupaten/kota, yaitu **Sambas (Kalbar), Ngada (NTT), Nias Selatan (Sumut), Ternate (Malut), dan Jayawijaya (Papua).** Penelitian ini juga melaksanakan diskusi kelompok terpumpun *Focus Group Discussion - FGD*) yang **melibatkan asosiasi profesi guru, yaitu PGRI, IGI, FSGI, APPKHI, IGPKHI, dan praktisi pendidikan, serta perwakilan guru, kepala sekolah dan pengawas satuan pendidikan wilayah 3T dan SLB.** Pengumpulan data dilakukan pada periode 18 Agustus sampai dengan 5 September 2020.

TEMUAN UTAMA

76%

guru khawatir dan ragu untuk kembali ke sekolah, terkait penularan COVID-19 & kondisi belajar tidak nyaman/tidak efektif.

95%

GURU SETUJU PELAKSANAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH/KOMBINASI.



HANYA 1 DARI 4 GURU

yang menyatakan kondisi sekolah akan aman dan kecil kemungkinan penyebaran COVID-19.

BAGAIMANA MENDUKUNG KINERJA GURU?

- Penguatan psikososial untuk guru, serta peserta didik dan orang tua.
- Ajakan untuk guru terlibat & bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.
- Pemantauan/pengawasan lapangan, kejelasan instruksi & pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan.

KEBUTUHAN PEMBELAJARAN MASA PANDEMI:

Alat perlindungan diri (APD) dari COVID-19, internet/pulsa & listrik untuk guru & peserta didik

Peningkatan kapasitas guru

- **62%** guru membutuhkan pelatihan digital tingkat lanjut.
- **35%** guru masih membutuhkan keterampilan pelatihan digital dasar.
- **1 dari 2 guru** membutuhkan kompetensi perilaku hidup bersih & sehat (PHBS) serta manajemen pendidikan masa darurat (EiE).
- **Guru 3T & Pendidikan Khusus** membutuhkan pendampingan khusus untuk proses pembelajaran.

Kelengkapan fasilitas sekolah

- Materi ajar & edukasi COVID-19.
- Pengaturan jaga jarak, jadwal & antar jemput peserta didik.
- Alat pengukur suhu tubuh & uji swab bila diperlukan.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa **hampir seluruh guru (95%) setuju pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan/atau dengan metode kombinasi**. Hampir setengah responden guru (45%) mengharapkan pembelajaran dapat dilakukan secara kombinasi antara pembelajaran tatap muka (PTM) dan PJJ. Kendala PJJ juga lebih terasa untuk guru yang mendampingi anak usia dini dan anak penyandang disabilitas atau Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).



“Orang tua mengeluh dan sulit dampingi anak BDR, terutama TK SD ... Orang tua juga sulit mendampingi ABK saat belajar dari rumah”, pendapat peserta FGD Guru 3T dari Nias Selatan



Khusus untuk guru 3T, sebagian besar responden berharap melakukan kombinasi PTM dan PJJ secara luring. Di sisi lain, **76% guru khawatir dan ragu untuk kembali ke sekolah**, karena ketakutan akan penularan COVID-19 dan kondisi belajar tidak nyaman/tidak efektif.

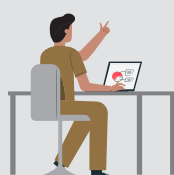
Namun, **persentase guru 3T yang berpendapat situasi sekolah akan aman lebih besar** dibandingkan guru non 3T, karena banyak wilayah 3T dengan kasus COVID-19 relatif rendah daripada kota-kota besar. Di sisi lain, **persentase guru pendidikan khusus yang menyatakan aman justru lebih kecil** dibandingkan guru umum. Hal ini bisa disebabkan oleh kesulitan guru untuk memastikan protokol kesehatan dapat dijaga anak penyandang disabilitas (atau ABK), terutama dalam menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun.

Sebagian besar responden juga menyebutkan **perlu adanya dukungan untuk penyediaan APD dan fasilitas CTPS (65% responden), insentif atau akses pada kuota internet atau pulsa (37%) serta pentingnya pemantauan dan pengawasan rutin dari berbagai pihak (31%)**, terutama bersama Dinas Kesehatan (Faskes), Satuan Tugas atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 setempat, pengawas sekolah, serta pihak non-pemerintah, baik dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Palang Merah Indonesia (PMI), tokoh masyarakat serta orang tua.



Selain itu, diperlukan pula materi edukasi terkait COVID-19 yang inklusif dan juga layanan psikososial untuk peserta didik penyandang disabilitas (atau ABK) dan orang tuanya, terutama untuk mengantisipasi kecemasan berlebihan pada anak.

“Bantuan layanan psikologis untuk ABK dan orang tuanya (menyasar kecemasan berlebihan pada anak)” pendapat peserta FGD Guru SLB dari Jakarta, dan “... cara menghilangkan rasa was-was dan curiga di antara anak. Pelatihan dukungan psikologis untuk guru dan anak”, pendapat peserta FGD Guru 3T dari Sulawesi Tengah.



Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa **guru membutuhkan peningkatan kapasitas tentang pembuatan video untuk materi ajar, penggunaan aplikasi kelas virtual, materi pola hidup bersih dan sehat (PHBS), manajemen pendidikan di masa krisis, pembekalan dukungan psikososial untuk diri dan peserta didik, serta metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan.**

“Prioritas ke depan dan guru harus mendapat wawasan tentang pendidikan inklusif karena terkait sistem zonasi dan hak-hak disabilitas. Pelatihan harus berkelanjutan, misalnya dengan pendekatan in class on job learning agar dapat dilakukan di sekolah. Perlu keterampilan pengelolaan pembelajaran baik daring dan luring, misalnya pembelajaran proyek di rumah agar pembelajaran bermakna. Selain IT guru perlu mapping home visit untuk siswa”, pendapat peserta FGD Asosiasi Guru dari APPKhl.



Rekomendasi Kebijakan

A. BAGI PEMERINTAH PUSAT

Rekomendasi dibagi dalam 4 komponen utama yaitu untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, serta komunitas pendidikan dan masyarakat.

A. Bagi Pemerintah Pusat, termasuk Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

1. Prioritas penerapan protokol kesehatan untuk keselamatan warga satuan pendidikan

- Memastikan *checklist* pembukaan satuan pendidikan dan proses perizinan peserta didik kembali belajar di satuan pendidikan menjawab kebutuhan guru dan kekhawatiran orang tua dan ada sistem monitoring di level nasional.
- Test COVID-19 secara merata di semua daerah.

2. Memiliki program terencana termasuk modul untuk pengembangan kapasitas guru baik secara daring maupun luring

- Pelatihan Pola Hidup Bersih dan Sehat, termasuk pencegahan dan penanganan COVID-19, serta manajemen pendidikan masa darurat.
- Pelatihan psikososial dan tumbuh kembang anak sebagai prakondisi mengajar serta membina mental dan karakter peserta didik.
- Pelatihan digital dasar (membuat dokumen dan menggunakan aplikasi pesan singkat, terutama untuk guru 3T) maupun tingkat lanjut (membuat video materi ajar dan menggunakan aplikasi kelas virtual) didahului dengan penilaian terlebih dahulu.
- Pelatihan metode pembelajaran daring, terutama untuk guru SLB, dan luring yang efektif dan menyenangkan (seperti: menyiapkan model dan modul pembelajaran yang kreatif, melakukan pemetaan dan perencanaan kunjungan rumah peserta didik).
- Peningkatan kapasitas dan melibatkan orang tua terkait peran orang tua dalam belajar di rumah, pengasuhan positif tanpa kekerasan, penguatan psikososial guru dan peserta didik, pembangunan kesadaran akan hak pendidikan anak, serta komunikasi dan pertukaran informasi dengan satuan pendidikan.

3. Penyesuaian kurikulum

- Kurikulum mengakomodasikan kombinasi strategi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh, baik luring maupun daring. Pembelajaran tatap muka diprioritaskan untuk pembinaan karakter peserta didik.
- Persiapan penyesuaian kurikulum yang matang sebelum diterapkan.

4. Efektivitas kepemimpinan pendidikan, diantaranya:

- Peningkatan kapasitas bagi kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS di masa COVID-19 setelah kebijakan baru dikeluarkan sehingga kepala sekolah dapat membuat keputusan yang tepat dengan percaya diri sesuai konteks lokal.
- Peningkatan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah, pengawas dan Dinas Pendidikan untuk lebih komunikatif (mendengar dan memahami), proaktif, kreatif, mampu bersinergi dengan berbagai pihak, konsisten dalam instruksi, bertanggung jawab di masa kritis, dan responsif dalam penyelesaian masalah serta mengambil keputusan berdasarkan data dan skala prioritas.
- Peningkatan kapasitas kepemimpinan kolektif kolejal Dinas Pendidikan daerah.

5. Regulasi, tata kelola, & koordinasi pemerintah, diantaranya

- Adanya *checklist* pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan di satuan pendidikan untuk memastikan keberlanjutannya, dilakukan secara berkala dan langsung oleh Pengawas dan Tenaga Kesehatan; dilengkapi aturan yang mengatur apabila *checklist* tidak sesuai standar protokol kesehatan.
- Lebih intens dan menggunakan media yang luas dalam melakukan sosialisasi mengenai standar operasi dan prosedur (SOP) yang ada agar lebih jelas dan dapat dipahami oleh guru, misalnya melalui surat edaran ke tiap satuan pendidikan didukung video yang disebar melalui gawai.
- Adanya kebijakan untuk mendorong satuan pendidikan bekerja sama dengan organisasi dan komunitas pendidikan (KKG/MGMP, asosiasi profesi guru) sebagai ekosistem belajar guru. Penguatan basis MGMP dan KKG dapat melalui SIM PKB.
- Adanya kebijakan yang mengatur kerja sama berbagai pemangku kepentingan (satuan pendidikan, pemerintah, LSM/asosiasi/swasta & masyarakat), misalnya mekanisme melibatkan Dinas Kesehatan/Puskesmas (Faskes), Dinas Pendidikan, Satgas/Gugus Tugas COVID-19, Pemerintah Desa/Kelurahan, serta orang tua dan komite satuan pendidikan untuk pembukaan satuan pendidikan.
- Penyesuaian sistem birokrasi yang memberi ruang pada Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan untuk mengambil keputusan secara mandiri.

6. Peningkatan akses & sumber daya

- Menjamin kesejahteraan fisik dan psikologis guru, terutama untuk guru honorer di satuan pendidikan swasta, serta memastikan tunjangan sertifikasi tepat waktu dan merata.

- Bekerja sama dengan K/L pusat lain untuk penyediaan gawai dan jaringan dan kuota internet untuk PJJ daring atau transportasi PJJ luring bagi guru dan peserta didik.
- Fleksibilitas dalam penggunaan dana BOS untuk PJJ daring dan luring, alokasi anggaran untuk program pendidikan dan peningkatan akses pendidikan.
- Jaminan akses terhadap data dan informasi yang berkualitas.

7. Perhatian khusus pada peserta didik penyandang disabilitas, SLB, dan Pendidikan Khusus

- Penundaan pembukaan satuan pendidikan SLB karena peserta didik penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus (ABK) lebih rentan tertular wabah.
- Penyederhanaan kurikulum Pendidikan Khusus karena pembelajaran daring sulit dilakukan pada peserta didik penyandang disabilitas.
- Memberi dukungan lebih kepada guru 3T dan SLB terkait metode pembelajaran baru dan penyesuaian kurikulum (kurikulum pandemi & RPP/modul Pandemi).

- Peningkatan pengakuan terhadap Pendidikan Khusus melalui kapasitas, sertifikasi, dan peninjauan ulang kenaikan pangkat guru SLB.
- Peningkatan keterampilan vokasi dan pendidikan khusus guru SLB dan pembangunan SLB.

8. Perhatian khusus pada satuan pendidikan dan guru di daerah 3T

- Memastikan ketersediaan materi ajar kurikulum baru terdistribusi ke wilayah 3T
- Berkoordinasi dengan K/L terkait untuk akselerasi infrastruktur listrik dan internet wilayah 3T, pengadaan guru dan akses institusi pendidikan tinggi untuk guru 3T.
- Pemerintah pusat rutin melakukan pemantauan dan pengawasan ke satuan pendidikan secara langsung, utamanya untuk SLB dan satuan pendidikan daerah 3T.

Referensi

Kemendikbud. (2020). *Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)*. Jakarta: Kemendikbud.

Kemendikbud. (2020). *Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Tentang Panduan Pembelajaran di masa Pandemi COVID-19*. Kemendikbud.

Kemendikbud. (2020). *Update Penanganan COVID-19 Bidang Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbud.

KPC-PEN. (2020). *Update Penanganan COVID di Indonesia, 15 Sep 2020*. Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Noah Yarrow, E. M. (2020). *Estimated Impacts of COVID-19 on Learning and Earning in Indonesia "How to Turn the Tide"*. Jakarta: World Bank Indonesia.

The Jakarta Post. (2020). *Indonesia records daily high of 4,465 new cases, 23 Sep 2020*. The Jakarta Post.

Smeru. (2020). *Learning from Home: A Portrait of Teaching and Learning Inequalities in Times of the COVID-19 Pandemic*. Smeru Research Institute.

WVI. (2020). *COVID-19 Rapid Recovery Assessment Wahana Visi Indonesia*. WVI.